



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS SOSIAL**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU
Jl. R.A. Kartini no. 14 Karang panjang
AMBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki arti yang penting dan strategis dalam kerangka mewujudkan optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, RENJA ini tidak akan mempunyai arti jika tidak digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan. Oleh sebab itu, kepada semua pihak terkait khususnya aparatur Dinas Sosial Provinsi Maluku dimintakan untuk dapat mengimplementasikannya secara maksimal guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020 khususnya, serta mewujudkan VISI dan MISI Pembangunan Tahun 2019 – 2024 pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Ambon, April 2021

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Maluku,



Sartono, Pinning, S.H.M.Kn
NIP. 196205231993031004

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program & Kegiatan Tahun 2022

- III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran
- III.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022
 - A. Target Sasaran Strategis Tahun 2022
 - B. Target Program dan Kegiatan Tahun 2022

Bab VI. Penutup

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan terhadap NKRI telah dilakukan semenjak zaman orde baru sampai sekarang (reformasi). Pembangunan yang dilakukan terdiri dari beberapa aspek yang dianggap sangat penting terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu meliputi Bidang Ekonomi, Bidang Politik dan Hukum, Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Pendidikan serta pembangunan terhadap sarana dan prasarana negara.

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia ilmu teknologi, yang berhubungan dengan semakin meluasnya jaringan informasi yang berkembang di hampir seluruh lapisan masyarakat, membuat nilai-nilai moral, etika dan budaya semakin tersudut oleh majunya dunia globalisasi.

Harga kebutuhan pokok yang terus melejit naik, membuat semakin menurunnya daya beli masyarakat, seakan-akan memperkeruh upaya-upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan penanganan masalah-masalah sosial.

Permasalahan sosial yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya selalu memberikan indikasi bahwa penanganan permasalahan kesejahteraan sosial selalu terabaikan, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Padahal tanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah sosial merupakan tanggung jawab semua pihak. Sesuai amanat-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Provinsi Maluku yang baru keluar dari keterpurukan akibat kondisi masa lalu selalu berupaya dengan sekuat tenaga untuk kembali ke kondisi yang aman dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Pemerintah daerah Tahun 2019-2024, yaitu “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan” dengan misi, yaitu :

1. Birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kolaboratif, bersih dan melayani
2. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau

3. Industrialisasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)
4. Pengembangan infrastruktur untuk koneksitas gugus pulau
5. Optimalisasi industri pertanian dan perikanan
6. Keamanan dan kepastian hukum untuk investasi dan pariwisata
7. Pengembangan pemuda kreatif dan berolahraga berprestasi
8. Pengembangan dan revitalisasi budaya maluku
9. Jaminan layanan kesehatan merata berkualitas dan gratis

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan amanat dan tindak lanjut dari pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang berfungsi menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan sehingga sinkron ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), karena memuat kebijakan Pembangunan daerah satu tahun dan menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 di bidang sosial, Dinas Sosial Provinsi Maluku berpedoman pada beberapa peraturan umum, yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku untuk satu tahun mendatang yang bertujuan :

1. Menjadikan renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
2. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Sosial Provinsi Maluku.
3. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja merupakan acuan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku. Dalam rencana kerja mengandung analisis capaian kinerja organisasi yang akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah penyimpangan kinerja yang menjadi dasar dalam perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022, terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Mengacu Rencana Strategi Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta strategi yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1. VISI

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang dijiwai Rasa Kesetiakawanan Sosial, Oleh dan Untuk Masyarakat di Maluku Secara Berkelanjutan “

2. MISI

Visi Dinas Sosial Provinsi Maluku tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara komprehensif.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional.

3. TUJUAN dan SASARAN

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemberdayaan sosial.
4. Terlayannya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui sistem panti dan luar panti.
5. Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

4. KEBIJAKAN

Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.

- (b) Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
- (c) Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
- (d) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (e) Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran- sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dan prioritas untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

5. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta mengacu pada kebijakan di atas, dipandang perlu meningkatkan kinerja aparatur serta mengembangkan strategi dengan cara merumuskan dan menetapkan program-program kerja serta kegiatan-kegiatan organisasi. Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Provinsi Maluku telah melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 16 (Enam Puluh Enam) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan prioritas guna penanggulangan kemiskinan, mengembangkan sumber daya aparatur serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Program tersebut antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Maksud dari program ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terfokus pada urusan administrasi perkantoran. Sasaran dari program ini adalah tercapainya dukungan dalam pelayanan administrasi guna kelancaran pelayanan perkantoran. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Adminstrasi Kepegawaian perangkat daerah
- 4) Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini bertujuan untuk menyediakan pemberdayaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi yang diimplementasikan melalui kegiatan :

1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi warga deportan untuk dikembalikan ke daerah asal yang diimplementasikan melalui kegiatan :

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota Asal.

d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas pemberian pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta kesetiakawanan sosial dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas terlantar di dalam panti
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam oanti
- 4) Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini bertujuan untuk menyediakan fasilitasi bantuan sosial keluarga serta pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten kota yang diimplementasi melalui kegiatan :

1. Pengangkatan anak anar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

f. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk menyediakan permakanan dan pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial yang diimplementasi melalui kegiatan

1. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Provinsi Maluku

g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi yang diimplementasikan melalui kegiatan :

1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

6. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

Selama Tahun Anggaran 2021, Dinas Sosial Provinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Meskipun keberhasilan belum terwujud secara optimal, namun kinerja yang diberikan sudah bergeser kearah kemajuan. Dengan didukung sumber daya aparatur yang memiliki potensi baik walaupun sarana dan prasarana yang kurang memadai, penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelaksanaan pembangunan dibidang sosial lebih difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang rentan dan mengalami masah sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara keseluruhan jumlah PMKS di Provinsi Maluku adalah 19 PMKS dari 27 Jenis PMKS, dan jumlah ini dapat di kategorikan menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu : Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan (penyandang disabilitas), Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Diskriminasi dan Eksploitasi.

Sampai dengan saat ini Dinas Sosial Provinsi Maluku telah mempunyai Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Perkembangan masalah kesejahteraan sosial berjalan seiring dengan lajunya pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi serta politik keamanan yang mana telah memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

Menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga dan juga meningkatnya teknologi informasi memberikan implikasi terhadap peningkatan permasalahan sosial. Hal lain yang dirasakan juga pengaruhnya adalah akselerasi perubahan struktur sosial yang timpang, yang berujung pada ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk dapat mengimbangi perubahan ini. Akibatnya, bermunculan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial seputar kehidupan masyarakat baik itu individu, keluarga, kelompok/komunitas, maupun masyarakat.

Kompleksitas dan intensitas permasalahan sosial ini akan menjadi beban dan akan meningkat kuantitasnya, jika upaya-upaya pencegahan, dan penanganan, tidak segera ditangani oleh pemerintah daerah, masyarakat dan juga stakeholder yang merupakan mitra pemerintah dalam penanganan permasalahan social.

Sesuai dengan kelompok sasaran prioritas penanganan, maka di Provinsi Maluku terdapat 6 (enam) kelompok sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu :

1. Kemiskinan
2. Keterlantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku
6. Korban Bencana

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan SKPD maka telah sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial untuk Tahun 2022. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan represenatatif tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Maluku. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capainnya.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Sosial Provinsi Maluku Provinsi Maluku yang tugas pokok dan fungsinya menyentuh langsung dengan kepentingan masyarakat, dalam mendukung arah dan kebijakan telah menetapkan rencana program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program pemberdayaan Sosial
3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
4. Program rehabilitasi sosial
5. Program perlindungan dan jaminan sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

III.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yaitu **“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan ”**, dan untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam visi tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah Maluku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Misi Dinas Sosial Provinsi Maluku selanjutnya dijabarkan kedalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara konprehensif.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial secara profesional.

Penjelasan arti dan makna dari jabaran misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial lebih di arahkan pada peningkatan manajemen institusi sosial dan aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial melalui penataan manajemen yang profesional, serta penyelenggaraan diklat umum dan teknis.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial secara konprehensif adalah suatu upaya meningkatkan peran aktif masyarakat, dan dunia usaha sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah-masalah sosial.

3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui perlindungan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial adalah suatu upaya penanganan masalah-masalah sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui *perlindungan sosial*, *rehabilitasi sosial* dengan sistem panti maupun non panti dan *pemberdayaan sosial* dengan mengedapankan pola penanganan dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial (*social work*).

III.2. TUJUAN DAN SASARAN

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen institusi sosial dan sumber daya penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.

SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

- (1) Meningkatnya kualitas lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Meningkatnya fungsi dan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar partisipan.
- (3) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin, keluarga miskin dan komunitas adat terpencil melalui pemberdayaan sosial.
- (4) Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS anak, lanjut usia terlantar, tuna sosial, eks korban NAPZA dan penyandang disabilitas melalui system panti dan luar panti.
- (5) Terlindunginya dan tertanganinya korban bencana, korban tindak kekerasan dan orang terlantar.

Dalam Rencana Kerja tahun 2021, Dinas Sosial Provinsi Maluku berupaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran dimaksud melalui program – program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka pada Tahun 2022 setiap program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- c. Program Pemberdayaan Sosial.
 - 1. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi Untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal.

- e. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.
 - 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
 - 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.
 - 4. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA.

- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

- g. Program Penanganan Bencana
 - 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

- h. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 1. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

BAB VI P E N U T U P

Secara umum berbagai program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku dalam Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari kebijaksanaan dan program yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Diharapkan Renja ini akan dapat menjawab tugas dan fungsi Dinas Sosial pada Tahun 2022 sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan kedepan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan penanganan masalah sosial yang ada dimasyarakat.

Ambon, April 2021

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Maluku,



Sartono Pireng, S.H.M.Kn
NIP. 196205231993031004

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022
PROVINSI MALUKU**

SKPD Dinas Sosial Provinsi Maluku

GUGUS

(Dalam Juta Rupiah)

KODE	PRIORITAS /FOKUS	GUGUS PULAU	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022			CATATAN PENTING	PERKIRAAN RENCANA TAHUN 2023	
					Kab/ Kota	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Terlaksananya kegiatan Moneva, Data Publikasi Pembangunan Sosial, Pemutakhiran DTKS dan Analisis Indeks Ketahanan Sosial	11 Kab/Kota	4 Keg	1.500.000.000		4 Keg	1.750.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Ambon, Namlea	1 Keg	345.000.000		1 Keg	370.000.000
			<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Aparatur Disiplin UPTD	Ambon	2 Keg	125.000.000		2 Keg	175.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah							
			<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor	Ambon	1 Keg	60.000.000		1 Keg	150.000.000
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	2 Keg	100.000.000		2 Keg	150.000.000
			<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	Untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	12 Bln	175.000.000		12 Bln	225.000.000
			<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Ambon	12 Bln	175.000.000		12 Bln	225.000.000
			<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terlaksananya rapat koordinasi ke luar daerah forum SKPD dan Rakor PKH	Ambon	2 Keg	870.000.000		2 Keg	900.000.000

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
			<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran kantor	Ambon	3 Unit	400.000.000		3 Unit	750.000.000
			<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Tersedianya dana untuk perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Ambon	22 Unit	200.000.000		22 Unit	250.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Tersedianya dana untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	12 Bln	85.000.000		12 Bln	150.000.000
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Tersedianya dana untuk kelancaran pekerjaan kantor	Ambon	12 Bln	350.000.000		12 Bln	500.000.000
			<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Tersedianya dana untuk jasa layanan umum kantor	Ambon	12 Bln	1.200.000.000		12 Bln	1.500.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
			<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan</i>	Tersedianya dana untuk jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Ambon	12 Bln	550.000.000		12 Bln	600.000.000
			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya dana untuk pemeliharaan / rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ambon	2 Unit	225.000.000		2 Unit	250.000.000
			<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Tersedianya dana untuk pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Ambon	12 Bln	200.000.000		12 Bln	200.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi							
			<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi</i>	Terselenggaranya Forum Koordinasi TKSK	Ambon	1 Keg	170.000.000		1 Keg	220.000.000
			<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi</i>	Terselenggaranya Kajian Pemberdayaan KAT di Provinsi Maluku	11 Kab/Kota	1 Keg	1.050.000.000		1 Keg	1.100.000.000

			<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>	Terselenggaranya Kegiatan KSN Expo, Seleksi Pilar-Pilar Berprestasi, Temu Forum Karang Taruna, Puskesos dan RBS SLRT	11 Kab/Kota	5 Keg	950.000.000		5 Keg	550.000.000
			<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</i>	Meningkatnya Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	11 Kab/Kota	1 Keg	250.000.000		1 Keg	300.000.000
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam Satu Daerah Provinsi							
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang</i>	Terselenggaranya Undian Berhadiah di 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	6 Kali	400.000.000		6 Kali	500.000.000
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MISGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal							
			<i>Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</i>	Terfasilitasi Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Ambon	100 Org	170.000.000		100 Org	200.000.000
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti							
			<i>Kebutuhan Berdasarkan Hasil Assesment</i>	Tersedianya Kebutuhan Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	Ambon	6 LKS	280.000.000	6 LKS	Ambon	325.000.000
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti							
			<i>Kebutuhan Berdasarkan Hasil Assesment</i>	Tersedianya Kebutuhan Anak Terlantar dalam Panti	Ambon	25 LKS	560.000.000	25 LKS	Ambon	600.000.000

			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti							
			<i>Kebutuhan Berdasarkan Hasil Assesment</i>	Tersedianya Kebutuhan Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	Ambon	1 Panti	250.000.000	1 Panti	Ambon	300.000.000
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti							
			<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA</i>	Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Kapasitas LKS Rehsos, Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan bagi Penyandang Kesos, Assesment Kebutuhan Penerima Pelayanan dalam Panti, Gerakan Stop Pemasangan, Peningkatan Kesetiakawanan Nasional	Ambon	5 Keg	1.000.000.000		5 Keg	1.250.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal							
			<i>Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</i>	Terlaksananya Kegiatan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Ambon	10 Orang	60.000.000		15 Orang	100.000.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi							
			<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	Terlaksananya Jambore PKH	Ambon	1 Keg	230.000.000		1 Keg	275.000.000
			<i>Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pendamping KUBE, Percepatan Pencegahan Stunting melalui Penguatan PKH dan Program Sembako	Ambon	3 Keg	1.005.000.000		3 Keg	2.500.000.000
			<i>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>	Pemberian Bantuan KUBE kepada Masyarakat dan Pemberdayaan KUBE untuk Keluarga Stunting	Ambon	3251 Org	1.245.000.000		3251 Org	1.500.000.000

			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi							
			<i>Penyediaan Permakanan</i>	Tersedianya Konsumsi Korban Bencana	3 Kab/Kota	3 Keg	265.000.000	3 Keg	300.000.000	
			<i>Penyediaan Sandang</i>	Tersedianya Sandang bagi Penanganan Korban Bencana	11 Kab/Kota	3 Keg	150.000.000	3 Keg	200.000.000	
			<i>Penyediaan Penampungan Pengungsi</i>	Tersedianya Kebutuhan Penampungan Pengungsi	11 Kab/Kota	3 Keg	250.000.000	3 Keg	300.000.000	
			<i>Pelayanan Dukungan Psikososial</i>	Terlaksananya Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana, Pemantapan Petugas Shelter, Manajemen Pengungsi, Tanggap Darurat Pasca dan Transisi Bencana, Penguatan SDM Psikososial Penanggulangan Bencana Keserasian Sosial, Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian, dan TAGANA Masuk Sekolah	11 Kab/Kota	7 Keg	1.550.000.000	7 Keg	1.750.000.000	
			<i>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</i>	Terpenuhinya Kebutuhan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3 Kab/Kota	3 Keg	75.000.000	3 Kab/Kota	150.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							
			<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</i>	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di TMP dan J. Leimena	Ambon	2 Keg	400.000.000	2 Keg	450.000.000	
TOTAL ANGGARAN							16.870.000.000			21.015.000.000